

**JALUR KUASA AMERIKA DI DUNIA:
Menguak Agenda Tersembunyi Demokrasi Negeri Paman Sam**

Kun Wazis

Dosen Tetap STAIN Jember
kunwazis@gmail.com

Judul : Demokrasi Ekspor Amerika Paling Mematikan
Penulis : William Blum
Penerbit : Bentang, Yogyakarta
Cetakan : 2013
Tebal : 460 halaman

Demokrasi telah menjadi nafas bagi sebagian besar negara di dunia. Sebagai sebuah pemikiran, demokrasi selalu dihadirkan dalam rupa yang manis dan menembus bidang lain yang sejatinya belum tentu bermakna demokratis. Agar lebih efektif dan efisien penyebarannya, berbagai bentuk komunikasi massa, mulai majalah, koran, buku, film, jaringan internet, televisi, radio, hingga media komunikasi lainnya ikut terjun mengusung “jargon” demokrasi. Berbagai penelitian, kajian teoritis di sejumlah lembaga riset, institusi pendidikan, dan ragam instansi juga menjadi bagian penting dari perjuangan demokrasi ini. Gerakan massa, aksi mahasiswa, demonstrasi buruh, dan gelombang protes di sejumlah negara pun berdalih “atas nama” demokrasi.

Perbincangan demokrasi tidak hanya sebatas realitas, tetapi merambah kepada ranah fikih. Kajian-kajian para pemikir Islam pun memunculkan keragaman dalam menyikapi demokrasi. Sebagian bersikap bahwa demokrasi adalah sesuatu yang boleh karena dianggap sebagai “salah satu alat” yang tidak berpengaruh dari aspek aqidah. Kalangan muslim yang lain bersikap menolak, bahkan mengharamkan karena demokrasi berangkat dari sistem sekular (pemisahan agama dari kehidupan), sehingga halal dan haram bisa dialogkan dalam iklim demokrasi. Kelompok lainnya mencoba berada di

“jalan tengah” mencari sesuatu yang dapat dikolaborasi dan dielaborasi dengan sistem yang ada saat ini, dengan harapan tidak dikatakan ketinggalan zaman dan dapat disebut sebagai negeri yang modern dan “semi demokratis”.

Para penganutnya terus membela mati-matian bahwa demokrasi adalah sistem yang disebut terbaik saat ini. Berbagai upaya untuk mendeskreditkan berusaha mereka imbangi dan dibantah dengan beragam dalil, yang terkadang argumentatif dan sebagian lainnya sekadar sporadis. Kegagalan demokrasi menjalankan misinya dalam membangun negara kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah bersifat absolut, tetapi lebih disebabkan oleh “oknum” penganut demokrasinya yang tidak akselerasi dengan pesan demokrasi. Sejumlah strategi mereka siapkan dalam membentengi “teror” terhadap bangunan demokrasi. Konstruksi makna terhadap demokrasi selalu diarahkan kepada sesuatu yang baik, karena ide yang diusung demokrasi sejatinya untuk kemasalahatan. Dalil-dali pun dicari padanan tafsirnya, karena agama mengajarkan keadilan dan dalam demokrasi juga mengusung keadilan, maka Islam dianggap demokratis. Karena Islam mengajarkan *syuro* (musyawarah), maka ketika demokrasi mengajarkan permufakatan dalam mengambil pendapat, maka *syuro* juga dimaknai sebagai bentuk demokratisasi. Bahkan, dialog antara Tuhan dengan Malaikat mengenai penciptaan manusia sebagai *kebalifah fil ardi* (pemakmur bumi) juga dikonotasikan sebagai dialog demokratis sehingga Tuhan pun layak mendapatkan baru “Tuhan Maha Demokratis”, dan sejumlah pemaknaan religius lagi.

Hal ini berbeda dengan kalangan penentang demokrasi yang sejak awal mempersoalkan asal usul demokrasi. Sebagai bangunan yang berangkat dari ideologi sekular kapitalis, demokrasi sejak awalnya menampilkan makna yang tidak sama dengan Islam. Demokrasi bukanlah *syuro* sebagaimana diajarkan Islam. Dalam demokrasi, perkara halal dan haram bisa dikompromikan dalam ranah institusi legislatif. Sah-sah saja pelacuran dilegalkan asalkan disepakati di parlemen, sebagaimana boleh saja pornografi dan pornoaksi ditampilkan karena hak asasi setiap individu yang dilindungi oleh nilai demokrasi. Tetapi, Islam tidak pernah memberikan toleransi perzinahan dihalkan meskipun atas nama konstitusi, sebagaimana Islam telah melarang orang mengumbar aurat di ranah umum, termasuk melalui media massa.

Dalam demokrasi, peredaran minuman keras bisa diatur berdasarkan kesepakatan sehingga jual beli miras (minuman keras) bisa sah-sah saja dilakukan. Hal ini berbeda dengan Islam, yang melarang peredaran miras sekaligus melarang berjual beli dengan sesuatu yang diharamkan. Demokrasi, bagi kalangan ini adalah haram, karena telah menggeser posisi Tuhan (Allah SWT) sebagai pembuat hukum. Karena bagi kalangan pemuja demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga ketika rakyat bersepakat, Tuhan “tidak diposisikan” sebagai pembuat aturan kehidupan manusia. Ditengah pedebatan demokrasi yang tak kunjung usai, sejumlah kritik terhadap praktik demokrasi justru bermunculan. Fakta paling nyata adalah praktek demokrasi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia selama bertahun-tahun mengalami berbagai kegagalan. Kacung Marijan, pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyebutkan, harus diakui, demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia selama lebih dari satu dekade belakangan memang masih tepercik noda di sana-sini. Demokrasi, misalnya, masih memiliki defisit. Antara harapan dan realitas masih belum sepenuhnya *nyambung*. Antara biaya yang dikeluarkan dan yang dihasilkan dianggap masih belum seimbang. Yang terakhir itu tidak lepas dari adanya kecenderungan demokrasi yang bercorak pasar. Hal tersebut terkait dengan sistem pemilihan yang dianut Indonesia belakangan, baik untuk pemilihan anggota DPR maupun pemilihan eksekutif (presiden dan kepala daerah). Sistem itu memungkinkan biaya yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah maupun para calon, membumbung tinggi (Kacung Marijan, *Defisit Demokrasi dan Ramalan Rasulullah SAW*, Jawa Pos Jumat 13 Agustus 2010).

Lebih lanjut Kacung Marijan mengungkapkan, permasalahan menjadi lebih rumit karena sistem tersebut juga melahirkan transaksi-transaksi jangka pendek yang bercorak material. Bukan rahasia lagi, ada calon yang telah membagi-bagikan materi tertentu kepada pemilih agar bisa meraih suara. Praktik semacam itu bukan sesuatu yang baru, memang. Sekitar dua abad lalu, Vilfredo Pareto sangat kecewa terhadap demokrasi di Italia. “Bagi dia, yang membuat seseorang terpilih sebagai wakil rakyat itu bukan karena kualitas intelektual yang dimiliki, bukan kepandaiannya, melainkan karena kemampuannya memanipulasi dan berbuat curang,” tulis pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga Surabaya itu.

Kenyataan dengan mengadopsi model “demokrasi pasar” tersebut berlanjut pada potret buruk pesta demokrasi pilkada di daerah. Tidak sedikit kasus transaksi politik para kandidat pemilukada berwujud pada politik uang (*money politic*) dan intrik politik kotor. Nafas ini sejalan dengan definisi dan keyakinan para penyeru demokrasi di Barat bahwa *politic is struggle for power* (politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan), sehingga jalan apa saja sah diambil dan “halal” ditempuh asalkan demi meraih kekuasaan. Berbagai kasus pada Pemilu Legislatif 2014 kembali muncul, mulai dari penggelembungan suara, penghitungan suara ulang, pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serangan fajar untuk membeli suara, hingga kericuhan dan kerusuhan massa caleg di berbagai terjadi di sejumlah daerah yang setelah ditelusuri akarnya karena adanya manipulasi suara rakyat.

Rakyat yang katanya menjadi suara Tuhan bisa dimanipulasi dengan rekayasa berkedok dan atas nama demokrasi. Buktinya, para kandidat yang sebenarnya belum mencerminkan representasi rakyat bisa memenangi pemilukada di daerah. Jabir Al Faruqi dalam tulisannya Koruptor Menang Pilkada (*Jawa Pos*, Selasa 10 Agustus 2010) menyebutkan fakta yang mengejutkan terhadap fenomena para *incumbent* yang berstatus tersangka dan menang mudah di sejumlah tempat, sedangkan *incumbent* yang tidak berstatus tersangka justru gagal memenangi pilkada.

Dalam pandangan kritis Ketua PW Ansor Jawa Tengah itu, bisa disimpulkan bahwa pilkada langsung yang secara filosofi digagas dan diterapkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang kapabel, bersih, dan berwibawa untuk membawa kesejahteraan rakyat daerah ternyata hanya pepesan kosong. Belajar dari pengalaman pelaksanaan pilkada selama ini di semua daerah, tampaknya, demokrasi di Indonesia ini masih identik dengan uang. Demokrasi memang telah membuka keran kebebasan bagi siapa pun untuk maju menjadi pemimpin daerah. Namun, ruang kebebasan itu ternyata tidak murah. Perlu dana besar untuk bisa menikmati ruang kebebasan tersebut.

Semua orang di negeri ini bisa melihat dan merasakan -bahkan menjadi pelaku demokrasi itu sendiri- bahwa maju sebagai calon kepala daerah itu tidak cukup hanya bermodal kebaikan, integritas teruji, profesionalitas

mumpuni, dan berpengalaman. Semua yang positif sebagai prasyarat menjadi pemimpin tersebut hilang ditelan bumi ketika (orang itu) tidak memiliki dana yang cukup besar untuk ikut pilkada. Sebaliknya, walaupun prasyarat-prasyarat sebagai pemimpin tidak terpenuhi---asalkan memiliki banyak uang--- (orang tersebut) tentu akan dipilih rakyat. Rakyat tidak lagi melihat status kandidat itu tersangka atau tidak. Bahkan, mantan narapidana korupsi pun ---kalau diperbolehkan mencalonkan diri dan memiliki banyak uang--- akan dipilih oleh rakyat.

Demokrasi: Sebuah Alat Hegemoni

Buku yang ditulis oleh William Blum memiliki perspektif menarik untuk didekati. Buku berjudul asli "*America's Deadliets Export Democracy: The Truth About US Foerign Policy and Everything Else*" yang diterbitkan Zed Books Ltd, London pada 2013 ini menarik perhatian para penganut maupun penentang demokrasi. Blum secara terbuka menyebutkan bahwa demokrasi menjadi alat yang efektif bagi Amerika Serikat (AS) untuk mendominasi dunia. Amerika bisa saja memaksakan kepentingannya di berbagai belahan dunia dengan beralih atas nama demokrasi. Amerika dapat saja menyerang Irak dan memporakporandakan atas nama kebebasan berdemokrasi. Negara Adi Kuasa tersebut juga terlibat berbagai aksi penculikan dan penyiksaan atas nama pencegahan terorisme yang diklaim sebagai pengganggu iklim demokrasi.

William Blum mengungkapkan, Amerika sejatinya tak menghendaki munculnya gerakan kebangkitan bangsa lain untuk menggantikan sistem kapitalisme yang selama ini dianut oleh negeri Obama itu. Dalam pengantar buku itu Blum menegaskan, "Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bagi kekuatan elit Amerika, salah satu tujuan abadi dan paling inti dari kebijakan luar negeri adalah mencegah bangkitnya masyarakat apa pun yang mungkin dapat menjadi contoh yang baik bagi suatu alternatif di luar model kapitalis," (hlm. xvii).

Perspektif Blum memang sepihak, tetapi dapat ditemukan sejumlah fakta yang mengungkapkan keberimbangannya. Sosok Blum bukanlah orang yang tidak memahami tentang Ideologi negeri Paman Sam itu. Dia sebelumnya pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Kare-

na memiliki pandangan yang berseberangan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat di Vietnam, maka pada tahun 1967, Blum meninggalkan tempat bekerjanya itu. Blum dikenal sebagai pakar anti-*mainstream* ternama dari Amerika Serikat di bidang kebijakan luar negeri. Blum adalah pendiri sekaligus editor *Washington Free Press*, koran “alternatif” pertama di ibu kota tersebut. Blum dikenal sebagai tokoh kritis yang menelorkan sejumlah karya menarik, diantaranya *Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II* dan *Rogue State: A guide to the World's Only Superpower*.

Pandangan Blum menemukan relevasinya dengan realitas sekarang. Berbagai kebijakan luar negeri Amerika sesungguhnya bukanlah membangun demokrasi yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Agenda tersembunyi (hidden agenda) sebenarnya adalah agar kepentingan ekonomi dan ideologi kapitalis-sekularis yang selama ini menjadi panutan negeri liberal itu. Dengan melihat sepak terjang Amerika, Blum menegaskan bahwa, “Ambisi Washington untuk mendominasi dunia bukan didorong oleh tujuan untuk membangun demokrasi yang mendalam ataupun kebebasan, dunia yang lebih adil, menghentikan kemiskinan atau kekerasan, atau planet yang lebih layak untuk dihuni, melainkan lebih karena ekonomi dan ideologi,” (hlm. xvi)

Dalam konteks ini, Blum menyadarkan kepada siapa saja yang “membebek” Amerika dalam praktek demokrasinya. Blum mengingatkan, bahwa Amerika bukanlah seperti yang kebanyakan diduga oleh kebanyakan orang di planet bumi ini. Untuk memahami kebijakan luar negeri AS, kata Blum, orang harus memahami prinsip bahwa AS berupaya mendominasi dunia, dan untuk tujuan ini, Amerika akan menempuh jalan apa saja yang diperlukan. Bukan sekadar beretroika didalam tulisannya, Blum menyebutkan fakta yang mencengangkan tentang dominasi negeri itu terhadap negara lain. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika telah:

1. Berupaya keras untuk menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan di luar negeri yang dipilih secara demokratis.
2. Secara kotor, ikut campur tangan dalam pemilu di lebih dari 30 negara.
3. Mencoba membunuh lebih dari 50 orang pemimpin negara-negara asing.
4. Mengebom penduduk di lebih dari 30 negara.

5. Mencoba untuk menekan gerakan rakyat atau nasionalis di 20 negara. (hlm. xi)

Terlepas dari pendokumentasian atas kejahatan-kejahatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, karena begitu luasnya intervensi-intervensi Amerika dan kurun waktu selama enam puluh delapan tahun, lebih sulit bagi dunia untuk betul-betul sepenuhnya memahami apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Secara keseluruhan, sejak 1945, Amerika Serikat telah menjalankan salah satu atau lebih tindakan-tindakan tersebut, baik sekali maupun beberapa kali. Tujuh puluh negara (Lebih dari sepertiga jumlah negara di dunia), di dalam proses tersebut, AS telah mencabut nyawa beberapa juta orang, membuat jutaan orang lainnya hidup dengan penuh kepedihan dan penderitaan, dan bertanggungjawab terhadap penyiksaan yang dilakukan atas ribuan orang lainnya. Kebijakan luar negeri AS tampaknya telah menuai kebencian dari mayoritas manusia di dunia yang mampu untuk kurang lebih memahami berita-berita peristiwa terkini dan sedikit paham tentang sejarah modern.

Dalam banyak kasus menghadapi negara yang tidak sejalan dengan demokrasi Ala negeri Paman Sam itu, Amerika tidak segan-segan menggunakan kekuatan militernya untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Blum mengemukakan negara yang menjadi kualifikasi sasaran adalah: (a) menimbulkan hambatan-hambatan terhadap hasrat tertentu Imperium Amerika; (b) hampir tidak berdaya melawan serangan udara; (c) tidak memiliki senjata nuklir (hlm. 27). Iraq dan Afghanistan adalah contoh yang paling nyata. Dengan berdalih negeri Saddam Husein yang berafiliasi ke Sosialisme Uni Soviet, Amerika menggunakan segala cara untuk melumpuhkan sengan mengawali isu kepemilikan senjata nuklir. Meski tidak dipastikan ada senjata pemusnah massal, Amerika berhasil meyakinkan sebagian negara-negara NATO untuk merestui tindakannya “mengagresi” Iraq. Akibatnya, negeri muslim kaya minyak yang dikenal sebagai kota 1001 malam itu dikuasai dan dihancurkan oleh, dan mengorbankan jutaan nyawa melayang di Irak hingga sekarang. Termasuk ketika melakukan pengeboman di Afghanistan juga “hanya” didasarkan pada asumsi bahwa Usamah bin Laden bersembunyi di negeri para Taliban itu. Kata Blum, “Irak bukanlah ancaman bagi Amerika

Serikat sama sekali. Dari kebohongan-kebohongan yang tak henti-hentinya terkait dengan Irak, ini adalah yang paling berbahaya, fondasi yang penting bagi seluruh kebohongan yang lain,” (hlm. 4)

Hal lain yang menarik diungkapkan Blum adalah bahwa Amerika selalu ingin memastikan pasar bebas bisa berlangsung di seluruh dunia. Ini terkait dengan kehidupan ekonomi Amerika. Maka segala hal yang bisa menghambat mekanisme pasar berlangsung, pasti akan disingkirkan oleh Amerika. Jerat Amerika ini masuk dengan berbagai jalan baik itu bantuan ataupun penggunaan lembaga-lembaga internasional yang notabene pemilik saham terbesarnya adalah Amerika. Mereka memaksakan berbagai kebijakan ke negara sasaran atas nama demokratisasi, liberalisasi, dan lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Marshall Plan yang merupakan salah satu anak panah di dalam sarung bagi mereka yang berjuang untuk menciptakan kembali Eropa sesuai dengan keinginan Washington:

1. Menyebarkan kidung pujian kapitalis---untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan pascaperang ke arah sosialisme.
2. Membuka pasar untuk menyediakan pelanggan baru bagi perusahaan-perusahaan Amerika---sebuah alasan utama untuk membantu membangun kembali perekonomian Eropa; contohnya, satu miliar dolar (dalam skala harga abad ke-21) tembakau didorong oleh kepentingan-kepentingan tembakau AS.
3. Mendorong terciptanya Pasar Bersama (Uni Eropa di masa depan) dan NATO sebagai bagian integral dari benteng pertahanan melawan apa yang diduga sebagai ancaman Soviet.
4. Menghancurkan kaum kiri di seluruh Eropa Barat yang paling terkenal ialah menyabotase partai-partai komunis di Prancis dan Italia dalam upaya mereka untuk meraih kemenangan pemilu yang sah dan tanpa kekerasan. Dana Marshall Plan secara diam-diam disalurkan untuk membiayai upaya ini dan janji untuk memberikan bantuan kepada suatu negara atau ancaman pemotongannya, digunakan sebagai klub intimidasi; tentu saja Prancis dan Italia akan dicoret sebagai penerima bantuan bila mereka tidak berjalan seiringan dengan plot untuk menyingkirkan komunis dari segala peran yang berpengaruh (hlm. 12-13)..

Sekadar diketahui, Marshal muncul di tengah gejolak politik di Afrika Utara dan Timur Tengah pada 2011. Nama Marshall Plan terus diulang-ulang oleh para tokoh politik dan media di seluruh dunia sebagai kunci untuk membangun kembali perekonomian masyarakat-masyarakat di Afrika Utara dan Timur Tengah sebagai penunjang terhadap apa yang dilihat sebagai kemajuan-kemajuan politik. Namun, *cavent emtor*, pembelilah yang harus waspada. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat yang menang di luar dan tidak hancur di dalam melihat sebuah pintu yang terbuka lebar atas supremasi dunia. Hanya satu hal yang disebut dengan “komunisme” yang menghalangi secara militer, ekonomi, dan ideologi. Oleh karena itu, seluruh pembentukan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat, kata Blum, dimobilisasi untuk menghadapi “musuh” ini dan Marshall Plan merupakan bagian yang integral dari kampanye ini (hlm. 12).

Kenyataan ini menegaskan bahwa demokrasi itu sejatinya sulit dicari tolok ukur dan relevansinya. Blum menyebutkan media massa *Washington Post* yang pada 2007 silam mengutip pernyataan Chester Crocker, mantan Asisten Menteri Luar Negeri dan saat ini menjabat sebagai anggota Komite Penasihat Departemen Luar Negeri terkait dengan Pemajuan Demokrasi yang menyatakan, “kita telah mampu menerima argumen bahwa AS tidak konsisten dan munafik dalam upayanya memajukan demokrasi di seluruh dunia. Mungkin hal itu benar adanya,” demikian statemen Chester sebagaimana dikutip oleh Blum dalam bukunya yang “menghujat” demokrasi itu (hlm. 30)

Teroris untuk Yang Tidak Demokratis

“Amerika Serikat tidak peduli dengan apa yang disebut dengan “demokrasi”, sesering apa pun Presiden Amerika menggunakan kata tersebut setiap kali membuka mulutnya,” demikian tulis William Blum untuk menggambarkan bahwa demokrasi *Ala* Amerika sekadar menjadi alat kepentingan tersembunyi (*bidden interest*) kebijakan luar negerinya. Bahkan, secara terencana memaksakan negara-negara yang tidak seafiliasi dengan keinginan politik Amerika bisa dicap dengan teroris yang dipersepsikan dan diperspektifkan. Padahal, kata Blum, Amerika Serikat tidak benar-benar antiterorisisme, hanya terhadap teroris-teroris yang tidak bersekutu dengan imperium saja.

Blum menyebut, ada sejarah panjang dan hina terkait dengan dukungan Washington terhadap berbagai teroris anti-Castro, bahkan ketika aksi-kasi terorisme dilakukan di Amerika Serikat. Saat ini, kata Blum, Luis Posada Carriles masih tetap dilindungi oleh pemerintah AS meskipun dia merupakan dalang dari peledakan sebuah pesawat Kuba yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 73 orang. Dia adalah salah satu dari ratusan teroris anti-Castro yang diberi perlindungan oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Amerika Serikat juga memberikan dukungan jarak dekat kepada para teroris atau bertarung di pihak yang sama dengan para pejuang muslim di Kosovo, Bosnia, Iran, Libia, dan Suriah, termasuk mereka yang diketahui terkait dengan Al-Qaeda, memajukan tujuan-tujuan dari kebijakan luar negeri lebih penting daripada memerangi terorisme (hlm. 4).

Untuk mendukung bahwa tidak demokratis sama artinya dengan teroris diungkapkan Blum secara khusus didalam bab 2 dengan judul “terorisme” yang menghiasai halaman 34-53 disertai fakta-fakta pendukungnya. Menurutnya, penangkapan calon-calon teroris berbahaya menjadi industri yang maju pesat di Amerika Serikat sejak peristiwa 11 September 2001. Blum menyebutkan, para pendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat berkali-kali menegaskan pernyataan mereka sejak peristiwa 11 September 2001: bahwasanya kebijakan kontra terorisme Amerika Serikat telah berhasil. Bagaimana mereka tahun, karena beberapa tahun kemudian, sejak kejadian nahas itu, tidak pernah ada serangan teroris lain yang berhasil di Amerika Serikat. Memang betul, tetapi tidak pernah juga terjadi serangan teroris di Amerika Serikat setidaknya enam tahun sebelum tragedi 11 September 2001. Serangan terakhir yang terjadi adalah peristiwa pengeboman di Oklahoma pada 19 April 1995. Ketiadaan serangan teroris di Amerika Serikat tampaknya menjadi kewajaran dengan atau tanpa melibatkan Perang Melawan Terorisme.

Yang lebih signifikan, kata Blum, di tahun-tahun berikutnya sejak peristiwa yang dikenal dengan sebutan 9/11, Amerika Serikat justru kerap menjadi target serangan teroris dalam berbagai kesempatan, belum termasuk serangan yang terjadi di Irak dan Afghanistan, serangan terhadap pihak militer, diplomat, warga sipil, kaum Kristiani, dan para target lainnya yang dianggap berhubungan dengan Amerika Serikat: di Timur Tengah, Asia Selatan, dan

di Pasifik yang terjadi lusinan kali lipat lebih banyak dibanding dengan di Pakistan sendiri.

Para teroris anti-Amerika tidak termotivasi oleh kebencian atau rasa iri terhadap kebebasan atau demokrasi, atau terhadap kemakmuran Amerika, pemerintahan sekuler, atau kebudayaan. Mereka termotivasi oleh puluhan tahun perlakuan buruk yang diakibatkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negeri mereka. Pada periode 1950-an hingga 1980-an di Amerika Latin, sebagai tanggapan terhadap panjangnya bahaya dari kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika, ada banyak sekali aksi terorisme terhadap target-target diplomatik dan militer Amerika Serikat, serta kantor-kantor perusahaan Amerika Serikat. Pengeboman, invasi, pendudukan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Iraq, Afghanistan, dan tempat-tempat lainnya di tahun-tahun belakangan ini telah menciptakan ribuan teroris baru yang anti-Amerika (hlm. 3-4).

Indonesia Dipuja, Irak Dimangsa Amerika

Untuk membuat fenomena yang kontradiktif tentang demokrasi yang diterapkan di berbagai negara, Blum mengungkapkan dua fenomena yang berseberangan, yakni Irak dan Indonesia. Penerapan demokrasi nyata-nyata hanyalah sekadar kepentingan. Selama mengikuti kepentingan Amerika, maka negara tersebut dipastikan tidak akan menghadapi masalah. Irak, negeri yang dibawah kepemimpinan Saddam Hussein itu akhirnya menjadi bagian dari operasi besar penghancuran oleh Amerika dan sekutu-sekutunya.

Secara khusus Blum membeberkan fakta menyedihkan Irak di bab 3 yang terkupas di halaman 54-88 yang memotret negara Irak yang maju, modern, dan terpelajar ditekan hingga menjadi negara gagal; bagaimana orang-orang Amerika mengebom negara itu selama 12 tahun sejak 1991 dengan berbagai alasan yang tidak kuat; kemudian, menginvasi, menjajah, dan menggulingkan pemerintahannya; termasuk menyiksa dan membunuh tanpa alasan yang mendasar; bagaimana rakyat dari negara yang tidak bahagia itu telah kehilangan segalanya. Sebuah studi yang dilakukan oleh PBB pada 2005 mengungkapkan bahwa 84 persen dari institusi pendidikan tinggi di Irak telah “dihancurkan, dirusak, dan dirampok”. Jumlah para intelektual di Irak sudah jauh berkurang karena ribuan akademisi dan profesional sudah meninggal-

kan negara itu atau diculik atau dibunuh; ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan penduduk Irak lainnya kebanyakan berasal dari kelas menengah yang terpelajar juga sudah pindah ke Yordania, Suriah, dan Mesir. Kebanyakan mereka pindah setelah menerima ancaman pembunuhan.

Blum dalam menulis tidak bertendensi melebih-lebihkan. Data-data yang ditampilkan adalah bisa diakses dimana-mana, hanya ditekankan pada bidang tertentu yang menggambarkan buruknya praktek yang kata Demokratis Ala Amerika itu. Blum menyebutkan bahwa fungsi sistem layanan kesehatan yang hilang. Tidak terjaganya kesehatan masyarakat. Infeksi mematikan, termasuk tifus, tuberkulosis, menyebar dengan dahsyat di seluruh area negara itu. Jaringan rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan di Irak, yang dulu dikagumi di seluruh Timur Tengah, dalam keadaan rusak parah sebagai akibat perang dan penjarahan. “Ribuan penduduk Irak kehilangan sebelah tangan atau kaki. Kebanyakan dari mereka adalah korban dari bom cluster yang tidak meledak saat dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat dari pesawat sehingga kemudian bom itu menjadi ranjau darat,” tulis Blum (hlm. 56).

Tak hanya Iraq, tetapi negeri Timur Tengah juga menjadi catatan sejarah buruk kebijakan luar negeri Amerika. Blum mencatat sejumlah peristiwa menyedihkan, tidak mengenal hak asasi manusia seperti dikampanyekan dalam demokrasi. Blum memerinci serangkaian cara sadis Amerika memaksakan Demokrasi Ala yang mereka kehendaki, yaitu: 1) penembakan terhadap dua pesawat Libia pada 1981; 2) pengeboman terhadap Lebanon pada 1983 dan 1984; 3) Pengeboman terhadap Libia pada 1986; 4) Pengeboman dan penenggelaman sebuah kapal Iran pada 1987; 5) Penembakan sebuah pesawat komersial Iran pada 1988; 6) Penembakan dua pesawat Libia pada 1989; 7) pengeboman besar-besaran terhadap rakyat Irak pada 1991 hingga 2003; 8) Pengeboman terhadap Afghanistan dan Sudan pada 1998; 9) Dukungan yang rutin terhadap Israel terlepas dari penghancuran dan penyiksaan yang rutin dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina; 10) Pengecaman rutin terhadap perlawanan Palestina terhadap hal ini; 11) Penculikan terhadap “tersangka-tersangka teroris” dari negara-negara muslim, seperti Malaysia, Pakistan, Lebanon, dan Albania, yang kemudian dibawa ke tempat-tempat seperti Mesir dan Arab Saudi, tempat mereka disiksa; 12) Keberadaan militer yang besar dan berteknologi tinggi di tanah yang paling suci bagi umat Islam,

Arab Saudi, dan di tempat-tempat lain di wilayah Teluk Persia; 14) Dukungan terhadap sejumlah besar pemerintahan yang tidak demokratis, otoriter di Timur Tengah, dari Syah Iran hingga Mubarak di Mesir hingga keluarga kerajaan di Saudi; 15) Invasi, pengeboman, dan pendudukan atas Afganistan pada 2001 hingga saat ini dan Irak pada 2003 hingga saat ini; 16) Pengeboman dan penembakan misil secara terus-menerus untuk membunuh orang-orang di Somalia, Yaman, Pakistan, dan Libia dalam periode 20006-2011; 17) Penggulingan Pemerintah Libia di bawah Muammar Gadafi pada 2011 (hlm. 403-404).

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Perlakuan Demokrasi Ala Amerika memang sesuai dengan kepentingan. Selama kepentingan negeri Paman Sam terjaga, disitulah demokrasi Ala tersebut dijalankan. Hal ini berbeda dengan Dalam kasus Indonesia, Amerika bekerja sama dengan sangat erat dengan militer Indonesia sejak rezim Soeharto berkuasa. Militer Indonesia dinilai berjasa kepada Amerika karena telah membantu menjaga kepentingan Amerika di Indonesia atas nama demokrasi. Tak heran banyak petinggi militer yang berkiblat kepada Amerika. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengaku bahwa Amerika adalah negara keduanya. Blum menggambarkan, kerja sama ini merupakan kerja sama paling erat di negara dunia ketiga. Pada 25 Mei 2005, Presiden Bush menyatakan bahwa masuk akal bagi Amerika untuk menjaga hubungan militer yang dekat dengan Indonesia meskipun terdapat berbagai keberatan dari para aktivis hak asasi manusia yang menyatakan bahwa koordinasi semacam itu harus ditunda hingga Indonesia lebih serius dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh militernya. “Kami ingin para tentara muda dari Indonesia datang ke Amerika Serikat. Kami ingin ada pertukaran antara korps militer kita—yang akan menciptakan pemahaman yang lebih baik,” ucap Bush sebagaimana ditulis Blum (hlm. 31-32).

Blum menulis bahwa selama empat puluh tahun, militer Indonesia telah terlibat dalam pembunuhan massal dan berbagai kejahatan di Jakarta, Timor-Timur, Aceh, Papua, dan di tempat-tempat lainnya membunuh sebanyak lebih dari sejuta orang, termasuk beberapa orang Amerika beberapa tahun belakangan ini. Selama empat puluh tahun, hubungan antara militer AS dan Indonesia adalah hubungan yang paling dekat dalam Negara Dunia

Ketiga bagi Amerika Serikat, terlepas dari keberatan dan larangan yang terkadang muncul dari kongres. Selama empat puluh tahun, para pejabat Amerika telah mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan melatih dan mempersenjatai militer Indonesia karena hubungan dengan militer Amerika akan menimbulkan kehormatan. Selama empat puluh tahun, tidak ada dampak semacam itu sama sekali. Seorang pejabat Amerika sebagaimana ditulis Blum menyatakan, “Kami tidak peduli seberapa brutalnya militer Indonesia karena mereka telah menyingkirkan Sukarno dan nasionalisme serta kenetra-lannya yang menyebarkan bagi kita. Selama empat puluh tahun, mereka telah membunuh orang-orang yang kita sebut komunis, membunuh orang-orang yang kita sebut teroris, dan melindungi minyak, gas alam, pertambangan, dan kepentingan perusahaan-perusahaan lainnya dari pengunjuk rasa di Indonesia. Jadi, bila hal tersebut bukanlah kebebasan dan demokrasi, saya tidak tahu apa lagi namanya,” (hlm. 33).

Pengaruh AS di Indonesia tidak hanya bidang militer, tetapi merambah dalam bidang lainnya. Sebagai contoh, di bidang ekonomi, Amerika menghegemoni kekayaan alam Indonesia atas nama penanaman modal asing. Di era 60-an ketika Orde Baru lahir, Amerika mengarahkan Soeharto agar memberi jalan bagi perusahaan Amerika beroperasi di Indonesia. Ini sebagai kompensasi naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan setelah berhasil menyingkirkan Presiden Soekarno. Jejak intervensi Amerika ini bisa terbaca pada setiap rezim. Pergantian rezim yang satu dengan rezim yang lain tak lepas dari kendali Amerika. Tak heran jika tidak ada perubahan kebijakan yang berarti dalam setiap kurun menyangkut sepak terjang perusahaan asing di Indonesia, termasuk perusahaan Amerika. Yang terjadi malah rezim-rezim penguasa tersebut mengokohkan keberadaan perusahaan asing itu untuk terus beroperasi di Indonesia. Pengokohan itu dapat ditelusuri dari berbagai produk perundangan yang berlaku. Semakin ke sini, berbagai undang-undang kian liberal. Ini berarti membuka kran bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Walhasil, demokrasi yang katanya untuk kepentingan rakyat tak pernah terbukti secara fakta. Demokrasi menjadi alat para kapitalis—dalam dan luar negeri—untuk mewujudkan kepentingan mereka atas nama konstitusi. Produk-produk hukum liberal lahir dari tangan wakil rakyat. Jadi semuanya seolah legal. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa

Amerika sejatinya bukanlah contoh sebuah negara demokrasi. Karena, kata Blum, tidak ada demokrasi di Amerika. “*America is not a democracy, it's plutocracy—rule by the rich!* (Amerika tidak demokrasi, ini adalah plutokrasi—yang kaya yang menentukan!),” demikian penegasan Blum seperti dikutip Media Umat *Edisi* 124, 21 Maret- 3 April 2014.

